

## JIKA PENULISAN SEJARAH INDONESIA DIMANIPULASI

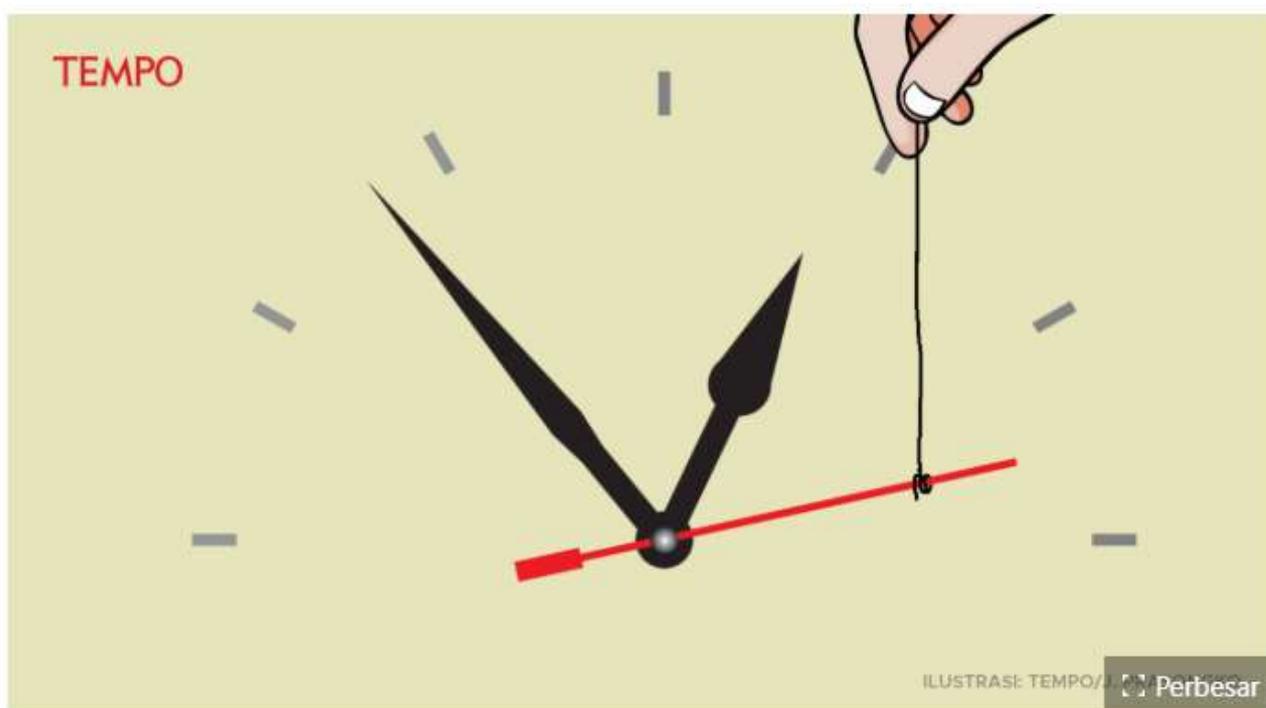


**Yanuar Nugroho**

Dosen Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara dan pendiri NALAR Institute

Pemerintah akan meluncurkan versi baru sejarah nasional. Mengapa rawan manipulasi dan apa saja bahayanya?

21 Mei 2025 | 15.00 WIB



*Ilustrasi: Tempo/J. Prasongko*

### Ringkasan Berita

- Sejarah harus menjadi ruang kontestasi yang sehat, bukan penyeragaman narasi oleh negara.
- Menulis ulang sejarah bukan kerja akademik netral tapi tindakan politik.
- Yang mengkhawatirkan bagaimana sejarah yang direkayasa perlahan itu masuk ke ruang kelas.

PADA awal Mei 2025, Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengumumkan bahwa pemerintah akan meluncurkan versi baru sejarah Indonesia pada 17 Agustus 2025, saat Indonesia merayakan 80 tahun kemerdekaan. Proyek besar ini dikerjakan oleh lebih dari 100 akademikus dan dikoordinasikan oleh sejumlah profesor dari beberapa kampus, seperti Susanto Zuhdi (Universitas Indonesia), Singgih Tri Sulistiyono (Universitas Diponegoro), dan Jajat Burhanuddin (Univeritas Islam Negeri Syarif Hidayatullah).

Sebanyak 12 jilid sejarah akan menampung sejarah baru Indonesia, mencakup era prasejarah hingga masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo—periode yang belum tercakup dalam sejarah Indonesia versi resmi 2012. Pemerintah menyatakan penulisan ini akan dilakukan

secara jujur dan obyektif. Susanto Zuhdi bahkan menekankan pentingnya mencatat “jatuh-bangun bangsa”—termasuk episode-episode kelam yang tidak nyaman dibaca.

Ia benar: sejarah tak boleh menjadi tempat berlindung dari rasa malu. Namun pertanyaan mendasarnya tetap: siapa yang menyusun, siapa yang mengarahkan, dan siapa yang menentukan versi final?

Di sinilah risiko manipulasi muncul. Apalagi ketika prosesnya didorong oleh negara yang elite politiknya punya jejak langsung dengan peristiwa-peristiwa sensitif dalam sejarah. Wajar jika publik cemas proyek penulisan ulang sejarah ini akan berujung pada narasi tunggal. Wakil Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Cucun Ahmad Syamsurijal bahkan mengingatkan pemerintah melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan.

Sejarah nasional tak boleh menjadi dokumen konsensus politik elite. Ia harus terbuka terhadap memori alternatif dan keragaman suara. Assmann (2011) menulis: ingatan kolektif tidak pernah tunggal. Justru, karena itu, sejarah harus menjadi ruang kontestasi yang sehat—bukan penyeragaman narasi oleh negara.

**Ingatan kolektif dalam Bahaya**

Apa masalah terbesar saat pemerintah yang sedang berkuasa menulis ulang sejarah—terutama dengan cara menghapus, menyeleksi, atau memanipulasi kejadian-kejadian penting? Bukan semata soal perubahan versi narasi, tapi juga pertarungan rusaknya kepercayaan warga pada memori kolektif bangsa.

Ingatan publik yang semestinya menjadi fondasi etis demokrasi perlahan menjelma menjadi ruang propaganda penguasa. Ketika negara ikut menentukan mana yang boleh diingat dan mana yang harus dilupakan, yang terganggu bukan isi buku pelajaran, melainkan keberanian warga untuk kritis bertanya, meragukan, dan mengingat.

Menulis ulang sejarah bukan kerja akademik netral. Ia tindakan politik: pilihan sadar antara menghadapi masa lalu dengan jujur atau menghapusnya demi kenyamanan dan kelanggengan kuasa hari ini. Michel-Rolph Trouillot (1995) menyebutkan proses ini sebagai *silencing the past*—pembungkaman terhadap bagian-bagian sejarah yang dianggap mengganggu stabilitas narasi resmi.

Kita mesti selalu ingat: bangsa yang tidak menjaga memori kritisnya akan kehilangan arah moral dan mudah tergelincir dalam logika otoritarianisme. Sejarah memang medan kontestasi memori dan bukan sekadar catatan peristiwa. Ia arena perebutan makna. Maka, jika memori kolektif digantikan versi tunggal yang disusun negara, yang tersisa bukan sejarah, melainkan mitologi kekuasaan.

Apakah ini semua hal baru? Rupanya bukan.

### **Jejak Pola Lama**

Kekhawatiran terhadap upaya negara menulis ulang sejarah tidak muncul mendadak. Kita menyaksikan pola berulang dalam dua dekade terakhir: pelanggaran hak asasi manusia berat diupayakan dilupakan secara sistematis lewat pendekatan non-yudisial. Ambillah contoh tragedi Trisakti dan Semanggi.

Kepala Staf Kepresidenan di masa pemerintahan Jokowi, Moeldoko, misalnya, pernah menyatakan kedua kasus itu akan diselesaikan lewat mekanisme Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Secara retorik, ini terdengar bijak. Tapi, dalam praktiknya, ia justru sering dijadikan jalan pintas menghindari pertanggungjawaban hukum. Dalam literatur *transitional justice* kita belajar: tidak akan ada keadilan sejati jika kebenaran dikompromikan atas nama stabilitas (Teitel, 2000).

Jalan hukum pun tampak dibiarkan buntu. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menyimpulkan bahwa tragedi Trisakti dan Semanggi tergolong pelanggaran HAM berat. Tapi DPR menolaknya, menyatakan bahwa peristiwa itu tak memenuhi syarat formil sebagai pelanggaran berat. Usulan pengadilan HAM ad

hoc pun otomatis gugur. Komnas HAM bahkan tiga kali mengirim berkas ke Kejaksaan Agung, tapi semuanya dikembalikan dengan alasan teknis.

Jelas, ini bukan sekadar ketidaksempurnaan prosedural, melainkan gejala lemahnya kemauan politik. Seperti diperingatkan Skaar (2011): impunitas yang dibiarkan terlalu lama akan membentuk dirinya menjadi bagian dari arsitektur kekuasaan.

Yang lebih mengkhawatirkan adalah bagaimana sejarah yang direkayasa perlahan itu masuk ke ruang kelas. Jika peristiwa seperti Semanggi dan kerusuhan Mei 1998 dihapus dari kurikulum, kita bukan hanya membentuk warga yang lupa, tapi juga warga yang tak tahu apa yang layak diingat. Paul Connerton (1989) menyebut ini sebagai *social forgetting*—lupa yang dilembagakan. Ketika ingatan kolektif dikontrol penguasa, kebenaran akan mati dalam senyap birokrasi.

### **Bahaya Rekayasa**

Penulisan ulang sejarah oleh negara, terutama ketika dilakukan oleh rezim yang memiliki kaitan langsung dengan peristiwa kelam masa lalu, membawa risiko besar terhadap integritas demokrasi dan keadilan. Setidaknya ada enam dimensi yang mesti dicermati secara kritis.

Pertama, ia mengaburkan fakta dan menghilangkan korban. Ketika tragedi seperti Mei 1998 atau kekerasan negara di Papua dan Aceh dihapus dari narasi resmi, negara dengan aktif menyingkirkan derita warga dari memori kolektif bangsa. Ini bentuk kekerasan simbolik yang memperpanjang luka sosial (Bourdieu, 1991). Dalam konteks ini, sejarah bukan hanya tidak memihak korban, tapi juga malah melayani narasi penguasa. Kata Trouillot (1995), *power is constitutive of the story* (kuasa itu membentuk cerita).

Kedua, penulisan ulang sejarah yang dikendalikan negara menormalisasi impunitas. Ketika pelaku kekerasan negara duduk dalam kekuasaan dan ikut menentukan narasi sejarah, proses pembersihan nama dan pencucian tanggung jawab berjalan lewat narasi, bukan pengadilan. Ini menciptakan preseden bahwa kekuasaan bisa menghapus jejak kesalahannya hanya dengan mengganti cerita. Ini disebut *impunity regime* (Snyder dan Vinjamuri, 2003); rezim yang mengelola kekuasaan lewat penghapusan tanggung jawab dan rekonsiliasi dangkal tanpa pengakuan dan pertanggungjawaban.

Ketiga, ini semua berujung pada delegitimasi perjuangan reformasi dan demokratisasi. Ketika Reformasi 1998 dan seluruh perjuangan sipil dihapus atau dikerdilkan menjadi sekadar catatan kaki—hanya tampil sebagai “kerusuhan” dan bukan puncak perjuangan melawan otoritarianisme—negara secara simbolis mencabut akar legitimasi demokrasi itu sendiri. Sejarah seperti itu membenarkan represi dengan dalih stabilitas. Ini bentuk *counter-memory*—saat memori warga diganti narasi hegemonik negara (Assmann, 2011).

Keempat, dan paling menentukan masa depan, dampaknya pada pendidikan dan kesadaran kritis generasi muda. Saat sejarah direkayasa, ruang kelas hanya menjadi tempat pembentukan warga yang ahistoris, apolitis, dan tunduk. Mereka tak lagi belajar bertanya, hanya menerima. Ini bentuk pedagogi ketundukan (Freire, 1970) yang melahirkan generasi tanpa daya kritis terhadap kekuasaan.

Ketika generasi muda tidak tahu tentang tragedi Semanggi, Petrus, atau Tim Mawar, mereka juga tak tahu mengapa impunitas harus dilawan. Akibatnya, demokrasi runtuh bukan karena tembakan senapan, melainkan arena lupa yang disengajakan bahkan dilembagakan.

Kelima, penulisan ulang sejarah yang menghapus fakta kekerasan negara melanggar prinsip-prinsip *transitional justice* yang semestinya menjadi fondasi negara pasca-otoriter seperti Indonesia. Rekonsiliasi sejati butuh empat pilar: pengungkapan kebenaran, pemulihan korban, reformasi institusi, dan pertanggungjawaban pelaku. Jika narasi sejarah justru dikendalikan mereka yang pernah ada di balik kekerasan, semua itu hanya jargon. Bukannya menjadi cara menyembuhkan luka, sejarah versi negara malah menorehkan luka berikutnya.

Keenam, akibatnya adalah hancurnya kepercayaan publik terhadap negara sebagai penyimpan kebenaran bersama. Sejarah seharusnya menjadi kontrak moral antara negara dan warga: sebuah ruang untuk mengakui kesalahan, menumbuhkan empati, dan belajar dari masa lalu.

Ketika catatan sejarah diputarbalikkan demi melayani segelintir elite, yang runtuh bukan hanya arsip, tapi juga kredibilitas institusi negara, dunia pendidikan, dan seluruh memori warga. Demokrasi tak bisa bertahan hanya dengan pemilu. Ia hidup dari kepercayaan tulus bahwa negara berpihak pada kebenaran. Tanpa itu, politik berubah menjadi pertunjukan dan warga jadi penonton yang sinis dan terasing dari sejarahnya sendiri.

### **Lantas, apa yang mesti dilakukan?**

Kita tak bisa membiarkan sejarah dibentuk hanya oleh mereka yang punya kuasa dan kepentingan. Upaya menulis ulang sejarah yang berpotensi manipulatif harus dijawab lewat gerakan pengetahuan tandingan masyarakat sipil dan komunitas akademik yang berintegritas. Para sejarawan, peneliti, guru, pegiat arsip, jurnalis, dan penyintas punya peran penting menjaga agar memori kolektif bangsa tidak dikooptasi negara.

Pertama, komunitas akademik di luar tim resmi pemerintah perlu dan harus menyatakan sikap secara terbuka. Pernyataan bersama, naskah tandingan, bahkan penyusunan sejarah “versi rakyat” yang lebih jujur dan reflektif dapat menjadi cara merawat keragaman ingatan dan melawan narasi tunggal. Jika sejarah resmi disusun top-down, versi tandingan mesti tumbuh dari bawah—berakar dari pengalaman, luka, dan suara warga.

Kedua, organisasi masyarakat sipil yang selama ini terlibat dalam isu HAM, pendidikan, dan kebebasan berekspresi mesti mengambil sikap. Aksi kolektif, termasuk kampanye publik, forum diskusi terbuka, bahkan petisi daring, dapat digalang untuk mendorong transparansi proses penulisan sejarah nasional dan memastikan keterlibatan publik yang lebih luas. Bila diperlukan, gugatan hukum berbentuk citizen lawsuit atau class action bisa diajukan, khususnya jika hasil proyek ini terbukti merugikan hak warga atas informasi yang jujur, benar, dan utuh.

Ketiga, ruang pendidikan alternatif—komunitas literasi, sekolah rakyat, podcast sejarah, kanal independen, hingga arsip digital warga—harus terus didukung dan diperluas. Ketika institusi formal mulai ragu mengajarkan kebenaran sejarah, inisiatif warga jadi benteng terakhir menjaga kesadaran generasi muda. Sejarah yang hidup tak hanya ditulis di buku, tapi juga diwariskan lewat cerita, seni, dokumenter, dan keberanian bersuara.

Yang paling penting, semua ini mesti dilakukan bersama—lintas generasi dan keilmuan. Melawan lupa bukan hanya soal masa lalu, tapi juga upaya membela hak warga untuk mengingat secara merdeka. Dan, seperti sejarah itu sendiri, perjuangan ini tak bisa diserahkan pada segelintir orang saja. Ia harus menjadi kerja kolektif seluruh bangsa.

Yang dipertaruhkan hari ini bukan hanya narasi masa lalu, tapi juga arah masa depan kita. Indonesia ada di persimpangan: apakah kita cukup jujur menatap sejarah apa adanya, atau memilih hidup dalam bayang-bayang penyangkalan dan impunitas yang diwariskan dari generasi ke generasi? Bila sejarah ditulis oleh mereka yang ingin menghapus jejaknya sendiri, rakyatlah yang harus menjaga ingatan itu tetap menyala.

Kita tak boleh membiarkan ruang ingatan dikunci oleh versi tunggal yang nyaman bagi kekuasaan. Sebab, begitu sejarah hanya ditulis dari balik meja birokrasi, kekuasaan akan selalu tampil tanpa dosa. “Melawan lupa” bukan semata menolak lupa, melainkan melawan pelurusan yang menyesatkan. Ini bukan urusan sejarawan saja, tapi juga tugas warga menjaga kewarasan demokrasi. Sebab, kita tahu: saat rakyat berhenti mengingat, kekuasaan berhenti malu. ●